

Kajian Teoritis Tentang Peran Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Politik Dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Amanda SyahPutri¹, Dewi Sentiana², Enjel Aprila Sari³, Hendra Ibrahim⁴

Abstrak

Penilaian kelayakan bisnis merupakan langkah krusial dalam pengambilan keputusan investasi, yang tidak hanya bergantung pada analisis finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Kajian teoritis ini menganalisis peran ketiga aspek tersebut dalam konteks bisnis di Indonesia. Aspek sosial mencakup interaksi bisnis dengan masyarakat, budaya, norma sosial, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membangun legitimasi dan social capital. Aspek ekonomi menekankan profitabilitas, efisiensi operasional, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional. Aspek politik meliputi stabilitas politik, kepastian hukum, regulasi, dan hubungan pemerintah-bisnis untuk meminimalkan risiko politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi ketiga aspek secara holistik meningkatkan keberlanjutan bisnis, mengurangi risiko kegagalan, dan mendukung penciptaan nilai bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis literatur terkait teori kelayakan bisnis dan faktor-faktor sosial, ekonomi, serta politik yang memengaruhinya

Kata Kunci: *Kelayakan bisnis, Aspek sosial, Aspek ekonomi, Aspek politik, Integrasi multidimensional*

Abstract

Business feasibility assessment is a critical step in investment decision-making, which relies not only on financial analysis but also on social, economic, and political considerations. This theoretical study examines the role of these three aspects in the context of business in Indonesia. The social aspect includes business interactions with society, culture, social norms, and corporate social responsibility (CSR) to build legitimacy and social capital. The economic aspect emphasizes profitability, operational efficiency, and contributions to regional and national economic development. The political aspect involves political stability, legal certainty, regulation, and government-business relations to minimize political risk. The study finds that holistic integration of these three aspects enhances business sustainability, reduces failure risks, and supports value creation for companies, society, and the environment. This research employs a library study method with a qualitative approach to analyze

literature on business feasibility theories and the influence of social, economic, and political factors.

Keywords: *Business feasibility study, Islamic economics, MSMEs, Shariah compliance, Profit-loss sharing*

A. PENDAHULUAN

Penilaian kelayakan bisnis merupakan tahap penting dalam pengambilan keputusan investasi. Keputusan bisnis yang matang tidak hanya mengandalkan analisis finansial, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga aspek ini saling terkait dan berperan dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Aspek sosial mencakup interaksi bisnis dengan masyarakat, budaya, norma sosial, dan perilaku konsumen. Pemahaman terhadap aspek sosial membantu perusahaan merancang strategi pemasaran dan manajemen sumber daya manusia yang tepat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan produk atau layanan di masyarakat. (Lestari & Budiman, 2021)

Dari sisi ekonomi, kondisi makro dan mikro ekonomi berpengaruh langsung terhadap performa bisnis. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, dan tingkat pengangguran menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan investasi. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi bisnisnya berdasarkan dinamika ekonomi ini agar tetap kompetitif. Aspek politik juga tidak kalah penting. Stabilitas politik, kebijakan pemerintah, regulasi usaha, serta hubungan diplomatik dapat memengaruhi kelancaran operasional bisnis. Lingkungan politik yang stabil dan ramah investor akan menurunkan risiko dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Kajian teoritis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aspek sosial, ekonomi, dan politik saling memengaruhi dalam penilaian kelayakan bisnis. Pemahaman yang holistik akan membantu pengambil keputusan dalam menentukan strategi investasi yang tepat dan meminimalkan risiko kegagalan. Aspek sosial juga terkait dengan demografi, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman harus memahami kebiasaan konsumsi masyarakat agar produknya dapat diterima dengan baik. Data sosial ini dapat menjadi panduan dalam merancang strategi pemasaran dan pengembangan produk. (Rahmawati & Setiawan, 2022)

Selain itu, data sosial dan ekonomi dapat divisualisasikan melalui indikator yang menggambarkan potensi pasar dan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Berikut adalah tabel data umum yang relevan:

Tabel 1. Data Umum Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik Terkait Kelayakan Bisnis

Aspek	Indikator	Nilai Umum/Contoh
Sosial	Populasi	100.000 orang
	Tingkat pendidikan	75% SMA atau lebih
	Tingkat urbanisasi	60%
Ekonomi	Pertumbuhan PDB	5% per tahun
	Inflasi	3,2%
	Pengangguran	6%
Politik	Stabilitas politik	Tinggi
	Regulasi usaha	Ramah investor
	Kebijakan perpajakan	Standar nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa aspek sosial, ekonomi, dan politik saling melengkapi dalam membentuk gambaran kelayakan bisnis. Populasi yang besar, tingkat pendidikan yang tinggi, dan urbanisasi yang meningkat menunjukkan potensi pasar yang menjanjikan. Kondisi ekonomi yang stabil seperti pertumbuhan PDB yang positif dan inflasi rendah memberikan keyakinan bagi investor bahwa lingkungan bisnis cukup kondusif. Hal ini dapat memengaruhi keputusan untuk menanamkan modal dan ekspansi usaha. (Kusuma & Pradana, 2020)

Stabilitas politik dan regulasi yang mendukung investor menambah kepercayaan pelaku bisnis. Risiko politik yang rendah meminimalkan ketidakpastian dalam operasional perusahaan, sehingga memungkinkan perencanaan jangka panjang yang lebih efektif. Penilaian kelayakan bisnis sebaiknya mempertimbangkan aspek finansial dan non-finansial secara bersamaan. Model evaluasi yang hanya mengandalkan data finansial cenderung mengabaikan risiko sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memengaruhi keberhasilan bisnis.

Kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan, tetapi juga oleh keberlanjutan sosial, kondisi ekonomi, dan kepatuhan terhadap regulasi politik. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam evaluasi bisnis. Dari perspektif sosial, teori perilaku konsumen menyatakan bahwa keputusan membeli dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku. Pemahaman terhadap preferensi masyarakat akan membantu perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. (Firmansyah & Hidayat, 2020)

Secara ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa lingkungan bisnis yang stabil dan sehat meningkatkan aktivitas investasi. Kondisi ekonomi makro yang baik akan meningkatkan konsumsi dan produksi, sehingga mendukung keberlanjutan usaha. Aspek politik juga memiliki pengaruh signifikan. Teori risiko politik menyebutkan bahwa ketidakstabilan politik dapat menurunkan nilai investasi dan meningkatkan biaya operasional. Investor cenderung menghindari wilayah dengan risiko politik tinggi.

Dalam praktik bisnis, analisis PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal*) sering digunakan untuk menilai kelayakan bisnis secara menyeluruh. Analisis ini mengintegrasikan data sosial, ekonomi, dan politik untuk menghasilkan keputusan investasi yang lebih matang. Kombinasi ketiga aspek ini juga terkait dengan keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat, menyesuaikan strategi dengan kondisi ekonomi, dan patuh terhadap regulasi politik cenderung lebih bertahan lama dan mengurangi risiko konflik. (Hidayat & Kurniawan, 2022)

Sinergi antara aspek sosial, ekonomi, dan politik dapat menjadi indikator risiko maupun peluang bisnis. Misalnya, urbanisasi yang tinggi mendorong pertumbuhan sektor ritel, namun efektivitasnya hanya optimal jika kondisi ekonomi mendukung dan regulasi politik tidak membatasi aktivitas bisnis. Kajian teoritis ini memberikan dasar bagi pengambil keputusan untuk melakukan evaluasi kelayakan bisnis secara komprehensif. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik, keputusan investasi akan lebih tepat sasaran dan risiko kegagalan dapat diminimalkan.

Dengan demikian, penilaian kelayakan bisnis tidak hanya soal angka finansial, tetapi juga tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis. Pendekatan ini memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dan selaras dengan lingkungan sekitarnya. (Susanto & Marlina, 2021)

B. KAJIAN TEORI

Penilaian kelayakan bisnis merupakan tahap penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan investasi. Kelayakan bisnis tidak hanya ditentukan oleh potensi keuntungan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang bersifat sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga aspek ini saling terkait dan menjadi dasar pertimbangan bagi pengusaha, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menilai peluang dan risiko suatu usaha. Kajian teoritis ini bertujuan menguraikan peran aspek sosial, ekonomi, dan politik secara mendalam dalam penilaian kelayakan bisnis.

1. Aspek Sosial dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Aspek sosial berkaitan dengan interaksi antara bisnis dengan masyarakat serta dampak sosial yang ditimbulkan. Kesuksesan suatu bisnis tidak hanya diukur melalui keuntungan finansial, tetapi juga dari kemampuan perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Bisnis yang mampu menciptakan nilai sosial cenderung memperoleh dukungan lebih besar dari komunitas sekitar.

Salah satu dimensi penting dalam aspek sosial adalah dampak terhadap tenaga kerja. Perusahaan yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan karyawan akan memperoleh citra positif. Selain itu, kesesuaian produk atau jasa dengan budaya, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemasaran. Produk yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan nilai masyarakat berpotensi menghadapi resistensi atau penolakan, sehingga menimbulkan risiko sosial. (Wijaya & Santoso, 2021)

Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi alat penting bagi perusahaan untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. CSR dapat diwujudkan dalam bentuk program sosial, pendidikan, kesehatan, atau pembangunan fasilitas umum. Implementasi CSR tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga mendorong loyalitas konsumen dan meminimalkan konflik sosial yang mungkin timbul akibat aktivitas bisnis. Dengan demikian, aspek sosial memberikan gambaran tentang sejauh mana bisnis dapat diterima oleh masyarakat dan berkontribusi positif terhadap pembangunan sosial. (Andriani & Kasmiruddin, 2020)

2. Aspek Ekonomi dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Aspek ekonomi menekankan kelayakan finansial dan keberlanjutan usaha dari perspektif pasar dan profitabilitas. Penilaian kelayakan ekonomi meliputi analisis biaya, pendapatan, risiko pasar, serta efisiensi operasional. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa bisnis mampu menghasilkan keuntungan yang memadai serta mampu bertahan dalam jangka panjang.

Analisis pasar merupakan salah satu komponen utama aspek ekonomi. Evaluasi terhadap permintaan produk atau jasa membantu perusahaan memahami peluang pertumbuhan dan potensi risiko. Pasar yang stabil dengan

permintaan konsisten menunjukkan bahwa usaha memiliki peluang lebih tinggi untuk sukses. Sebaliknya, pasar yang volatile atau menurun memerlukan strategi mitigasi risiko yang matang. (Nugroho & Suharto, 2021)

Kelayakan finansial juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian bisnis. Proyeksi arus kas, penghitungan laba bersih, *Return on Investment* (ROI), dan *Net Present Value* (NPV) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menilai profitabilitas. Analisis ini membantu perusahaan menentukan apakah investasi layak dilakukan dan berapa lama periode pengembalian modal yang realistis. Efisiensi operasional juga menjadi faktor penentu, karena penggunaan sumber daya yang optimal dapat menekan biaya produksi, meningkatkan margin keuntungan, dan mendukung daya saing perusahaan.

Selain itu, aspek ekonomi juga mencakup pertimbangan terhadap daya beli masyarakat dan tren konsumsi. Bisnis yang mampu menyesuaikan harga produk dengan kemampuan ekonomi konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan tren pasar memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Secara keseluruhan, aspek ekonomi memberikan kerangka yang jelas tentang potensi keuntungan, risiko finansial, dan kelangsungan usaha di pasar. (Handoko & Wibowo, 2021)

3. Aspek Politik dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Aspek politik memengaruhi kondisi regulasi dan stabilitas yang menjadi dasar operasional bisnis. lingkungan politik yang stabil serta peraturan yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meminimalkan risiko kegagalan usaha. Bisnis yang beroperasi di wilayah dengan stabilitas politik tinggi cenderung memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi mereka.

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu elemen kunci dalam aspek politik. Peraturan mengenai pajak, perizinan usaha, tarif perdagangan, serta insentif investasi memengaruhi biaya dan strategi operasional perusahaan. Perubahan kebijakan yang mendadak atau ketidakpastian regulasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan, terutama bagi usaha baru atau bisnis yang sedang berkembang. Oleh karena itu, pemantauan terhadap kebijakan pemerintah dan kemampuan menyesuaikan strategi bisnis menjadi hal penting. (Hakim & Nurhasanah, 2020)

Selain itu, stabilitas politik juga mencakup keamanan sosial dan lingkungan hukum yang mendukung kegiatan usaha. Ketidakstabilan politik, konflik internal, atau perubahan rezim pemerintah dapat menimbulkan gangguan operasional, merusak citra perusahaan, dan mengurangi minat investor. Bisnis yang mampu menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan politik, termasuk pemerintah lokal, asosiasi industri, dan lembaga regulasi, cenderung lebih mudah mengakses sumber daya, memperoleh izin, dan menghadapi risiko politik dengan lebih baik.

Hubungan harmonis dengan pemerintah dan lembaga politik juga membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan hukum, memperkuat posisi dalam negosiasi, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, aspek politik tidak hanya memengaruhi kelancaran operasional sehari-hari, tetapi juga menentukan daya tahan perusahaan terhadap perubahan lingkungan eksternal yang bersifat strategis. (Utami & Saputra, 2022)

4. Integrasi Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik

Penilaian kelayakan bisnis yang efektif menuntut integrasi yang menyeluruh antara aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, keberhasilan aspek ekonomi dapat terganggu jika aspek sosial diabaikan, seperti munculnya konflik dengan masyarakat lokal atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan karyawan. Sebaliknya, ketidakpastian politik dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis.

Pendekatan holistik dalam penilaian kelayakan bisnis memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, kepatuhan terhadap regulasi, dan risiko politik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Menyeimbangkan ketiga aspek untuk memastikan keberlanjutan usaha.
- b. Meningkatkan daya saing melalui strategi yang adaptif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
- c. Meminimalkan risiko yang timbul dari ketidakseimbangan ketiga aspek. (Wahyudi & Kristianto, 2020)

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek secara simultan, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, berkembang, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi kelayakan bisnis yang menyeluruh ini memberikan dasar yang kokoh untuk pengambilan keputusan strategis dan investasi yang bijak, sekaligus menciptakan nilai yang berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam penilaian kelayakan bisnis. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal, artikel, dan sumber resmi terkait teori kelayakan bisnis serta aspek sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhinya. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan hubungan, dampak, dan relevansi ketiga aspek terhadap keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam konsep-konsep teoritis, peran setiap aspek, serta integrasi ketiganya dalam penilaian kelayakan bisnis, sehingga memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis di dunia usaha.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Aspek Sosial dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Aspek sosial memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan bisnis, terutama di Indonesia yang kaya akan keragaman sosial-budaya. Perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia telah berkembang dari kegiatan amal menjadi strategi bisnis yang terintegrasi. Dalam penilaian kelayakan bisnis, aspek sosial meliputi pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup komunitas sekitar perusahaan. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan

nilai lokal dan praktik manajemen modern cenderung lebih diterima oleh masyarakat. (Sari & Rahman, 2020)

Tiga pilar utama yang perlu diperhatikan adalah:

- a. *Profit* : menciptakan nilai ekonomi.
- b. *People* : meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat.
- c. *Planet* : menjaga kelestarian lingkungan.

Legitimasi sosial menjadi aset penting bagi perusahaan. Penerimaan masyarakat dapat meningkat jika aktivitas sosial perusahaan selaras dengan nilai budaya dan agama setempat. *Social mapping* membantu mengidentifikasi tokoh kunci, kelompok rentan, potensi konflik, dan peluang kerja sama sehingga strategi engagement lebih efektif. Selain itu, kesesuaian dengan norma, nilai, dan budaya lokal sangat menentukan keberhasilan bisnis. Bisnis yang menghormati harmoni sosial dan prinsip keseimbangan, seperti *tri hita karana* di Bali atau *dalihan na tolu* di Batak, cenderung lebih diterima. Social capital berupa jaringan, norma, dan kepercayaan masyarakat juga penting, termasuk aspek gender dan inklusi sosial untuk akses setara bagi perempuan dan kelompok marginal. (Suryani & Pratiwi, 2022)

Pengukuran dampak sosial penting untuk menunjukkan nilai yang diciptakan. Pendekatan yang umum digunakan adalah Social Return on Investment (SROI), *Theory of Change*, dan *participatory impact assessment*. Indikator pengukuran meliputi ekonomi (lapangan kerja), sosial (akses pendidikan), lingkungan (kualitas udara/air), dan tata kelola (transparansi). Monitoring partisipatif melibatkan masyarakat sehingga mereka menjadi bagian aktif dalam perbaikan program. (Hakim & Nurhasanah, 2020)

2. Peran Aspek Ekonomi dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Aspek ekonomi menjadi dasar utama dalam penilaian kelayakan bisnis. Hal ini mencakup kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan, kelayakan finansial, daya tahan terhadap risiko ekonomi, efisiensi operasional, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional. Analisis kelayakan finansial menilai apakah bisnis mampu menutup biaya investasi sekaligus memberikan keuntungan yang wajar. Metode yang umum digunakan meliputi *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period*, dan *Profitability Index*. NPV positif menunjukkan proyek mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, sedangkan IRR yang lebih tinggi dari *cost of capital* menunjukkan profitabilitas investasi. Proyeksi pendapatan harus mempertimbangkan ukuran pasar, daya beli konsumen, strategi harga, pola musiman, dan faktor eksternal seperti inflasi atau perubahan kebijakan fiskal (Sari & Rahman, 2020). Analisis sensitivitas dan skenario membantu perusahaan memahami risiko yang mungkin terjadi, seperti perubahan harga bahan baku atau penurunan permintaan pasar.

Analisis pasar menjadi bagian penting untuk menilai apakah produk atau layanan memiliki permintaan yang cukup. Ukuran pasar, pertumbuhan, segmentasi, target pasar, serta posisi produk di pasar menjadi faktor utama. Karakteristik pasar Indonesia menuntut strategi adaptif: sebagai negara kepulauan dengan kesenjangan pendapatan dan penetrasi digital yang beragam, perilaku konsumen berbeda-beda, sensitif terhadap harga, dan cenderung loyal terhadap merek yang dipercaya. Perusahaan harus memanfaatkan pendekatan

omnichannel (offline dan online) agar dapat menjangkau seluruh segmen pasar. Efisiensi operasional juga menjadi faktor penentu profitabilitas. Analisis mencakup proses produksi, rantai pasok, produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan aset, serta kualitas layanan (Utami & Saputra, 2022). Infrastruktur yang bervariasi, birokrasi, ketersediaan tenaga ahli, dan tingkat adopsi teknologi menjadi faktor yang memengaruhi efisiensi operasional di Indonesia. Perusahaan dapat mengadopsi metode continuous improvement seperti Lean, Six Sigma, dan Kaizen untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional.

Risiko ekonomi meliputi risiko pasar, operasional, finansial, strategis, dan eksternal. Di Indonesia, risiko khusus termasuk bencana alam, infrastruktur yang belum merata, perubahan regulasi, fluktuasi mata uang, dan ketidakpastian politik. Strategi mitigasi dapat dilakukan melalui penghindaran, pengurangan, pemindahan (misalnya melalui asuransi atau kontrak), atau penerimaan dengan rencana kontinjensi yang matang. Selain itu, kelayakan bisnis juga dinilai dari kontribusinya terhadap ekonomi yang lebih luas. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, kontribusi pajak, devisa, transfer teknologi, serta pengembangan industri terkait menjadi indikator penting. Pemerintah Indonesia memberikan insentif bagi investasi di daerah kurang berkembang dan sektor prioritas seperti manufaktur, pariwisata, pertanian, infrastruktur, ekonomi digital, dan energi terbarukan, yang dapat meningkatkan daya tarik bisnis sekaligus mendorong pembangunan nasional. (Suryani & Pratiwi, 2022)

3. Peran Aspek Politik dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Aspek politik memengaruhi kelayakan bisnis melalui stabilitas politik, kepastian hukum, regulasi, hubungan pemerintah-bisnis, dan risiko politik. Stabilitas politik menjadi fondasi bagi iklim investasi yang kondusif. Di Indonesia, meski stabilitas politik meningkat sejak reformasi 1998, fragmentasi politik, potensi konflik sosial, dan perubahan kebijakan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Kepastian hukum meliputi konsistensi regulasi, penegakan hukum yang adil, dan independensi lembaga peradilan. Ketidakpastian hukum atau penegakan hukum yang lemah dapat menurunkan minat investasi, meningkatkan biaya modal, dan menyulitkan kontrak jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengantisipasi perubahan regulasi, memastikan kepatuhan, dan membangun hubungan baik dengan pemerintah serta lembaga terkait. (Susanto & Marlina, 2021)

Selain itu, kebijakan publik, stabilitas pemerintahan, dan hubungan pemerintah-bisnis menjadi faktor kunci yang memengaruhi operasional dan strategi bisnis. Perusahaan yang mampu menyesuaikan strategi bisnis dengan regulasi, memanfaatkan insentif, dan menjaga hubungan baik dengan pihak berwenang cenderung lebih berpeluang sukses. Strategi mitigasi risiko politik meliputi diversifikasi investasi, adaptasi terhadap perubahan kebijakan, perencanaan kontinjensi, serta komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan pemerintah. (Hidayat & Kurniawan, 2022)

1. Aspek Sosial dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam penilaian kelayakan bisnis di Indonesia. Temuan ini memperkuat argumen teoretis bahwa bisnis modern tidak dapat lagi dipisahkan dari konteks sosial-budaya di mana ia beroperasi. *Evolusi Corporate Social Responsibility (CSR)* dari aktivitas filantropi menjadi strategi bisnis terintegrasi

mencerminkan pergeseran paradigma dalam teori stakeholder, di mana legitimasi sosial dipandang sebagai aset strategis yang berkontribusi terhadap keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

Penerapan konsep triple bottom line (profit, people, planet) dalam konteks Indonesia menunjukkan relevansi teori ini dengan realitas empiris. Ketiga pilar tersebut bukan hanya merupakan framework normatif, tetapi juga strategi praktis untuk membangun competitive advantage dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup komunitas lokal secara teoretis dapat dipahami sebagai investasi dalam social capital yang pada akhirnya akan menurunkan transaction costs dan meningkatkan *operational efficiency*. (Firmansyah & Hidayat, 2020)

Pentingnya social mapping dalam mengidentifikasi stakeholder kunci, kelompok rentan, dan potensi konflik menunjukkan aplikasi praktis dari teori stakeholder management. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, pendekatan *kulturally-sensitive* menjadi keharusan, bukan pilihan. Konsep-konsep lokal seperti tri hita karena di Bali atau dalihan na tolu di Batak merepresentasikan indigenous knowledge yang harus diintegrasikan dalam teori manajemen kontemporer. Hal ini mengkonfirmasi teori institutional isomorphism, di mana organisasi yang beradaptasi dengan norma dan nilai lokal cenderung memperoleh legitimasi lebih besar.

Social capital yang terbentuk melalui jaringan, kepercayaan, dan norma masyarakat secara teoretis dapat mengurangi *information asymmetry* dan *monitoring costs* dalam transaksi bisnis. Penekanan pada gender dan inklusi sosial mencerminkan adopsi prinsip-prinsip *sustainable development* yang mengintegrasikan dimensi keadilan sosial dalam penilaian kelayakan bisnis. Hal ini sejalan dengan teori *justice-based approach* dalam *business ethics* yang menekankan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh stakeholder. (Nugroho & Suharto, 2021)

Pengukuran dampak sosial melalui Social Return on Investment (SROI) dan *Theory of Change* memberikan kontribusi teoretis penting dalam mengkuantifikasi nilai sosial yang selama ini dianggap intangible. Monitoring partisipatif yang melibatkan komunitas mencerminkan penerapan prinsip *democratic accountability* dan *empowerment*, yang secara teoretis akan meningkatkan efektivitas program dan memperkuat *social license to operate*. (Rahmawati & Setiawan, 2022)

2. Pembahasan Aspek Ekonomi dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Aspek ekonomi tetap menjadi fondasi dalam penilaian kelayakan bisnis, sebagaimana ditekankan dalam teori ekonomi klasik bahwa profitabilitas merupakan kondisi necessary (meskipun bukan sufficient) untuk keberlanjutan organisasi bisnis. Penggunaan metode-metode analisis finansial seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period*, dan *Profitability Index* merepresentasikan aplikasi teori present value dan capital budgeting dalam konteks praktis. NPV positif mengindikasikan penciptaan nilai ekonomi, sejalan dengan teori value creation yang menekankan bahwa tujuan fundamental bisnis adalah memaksimalkan nilai bagi shareholders. Namun, dalam konteks studi ini, penciptaan nilai tidak hanya diukur dari perspektif finansial semata, tetapi juga dari kontribusi terhadap ekonomi yang lebih luas. Hal ini

mencerminkan sintesis antara *shareholder theory* dan *stakeholder theory* dalam penilaian kelayakan bisnis. (Kusuma & Pradana, 2020)

Analisis pasar yang menyeluruh meliputi ukuran pasar, pertumbuhan, segmentasi, dan penempatan produk merupakan penerapan teori pemasaran dan manajemen strategi. Karakteristik unik pasar Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi menuntut pendekatan yang fleksibel, di mana strategi bisnis harus disesuaikan dengan konteks lokal. Perilaku konsumen yang sensitif terhadap harga namun tetap setia pada merek dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen, khususnya terkait elastisitas harga dan nilai merek. Pentingnya efisiensi operasional dalam menentukan keuntungan sejalan dengan teori keunggulan operasional dan pandangan berbasis sumber daya, yang menekankan bahwa keunggulan bersaing berasal dari kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Penerapan metode perbaikan berkelanjutan, seperti Lean, Six Sigma, dan Kaizen, mencerminkan penerapan teori pembelajaran organisasi dan optimasi proses dalam konteks Indonesia yang menghadapi tantangan infrastruktur, birokrasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. (Handoko & Wibowo, 2021)

Manajemen risiko ekonomi yang menyeluruh mencerminkan penerapan teori portofolio modern dan manajemen risiko perusahaan. Risiko-risiko khas Indonesia seperti bencana alam, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakpastian kebijakan memerlukan pendekatan pengurangan risiko yang matang. Strategi diversifikasi, lindung nilai, dan perencanaan darurat merupakan wujud dari pengelolaan risiko yang hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian dan gejolak pasar. Kontribusi bisnis terhadap ekonomi secara keseluruhan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, pembayaran pajak, dan transfer teknologi menunjukkan dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas dari kelayakan usaha. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menekankan peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Insentif pemerintah untuk investasi di sektor prioritas dan daerah tertinggal mencerminkan penerapan kebijakan industri dan pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan yang merata. (Andriani & Kasmiruddin, 2020)

3. Pembahasan Aspek Politik dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Aspek politik memiliki pengaruh penting terhadap kelayakan bisnis. Bisnis tidak bisa dipisahkan dari sistem politik di sekitarnya. Stabilitas politik yang meningkat sejak reformasi 1998 telah menciptakan kerangka kelembagaan yang lebih mendukung investasi. Namun, fragmentasi politik dan kemungkinan perubahan kebijakan tetap menjadi risiko yang harus dikelola dengan hati-hati. Kepastian hukum merupakan syarat utama dalam sistem kelembagaan, di mana aturan yang jelas dan mekanisme penegakan hukum yang efektif menciptakan lingkungan bisnis yang dapat diprediksi. Konsistensi peraturan, penegakan hukum yang adil, dan independensi lembaga peradilan merupakan bagian dari tata kelola yang baik, yang secara teori dapat menurunkan biaya transaksi dan risiko investasi. Ketidakpastian hukum dapat terjadi ketika lembaga formal lemah, sehingga menimbulkan kegagalan pasar dan menghambat kegiatan ekonomi. (Wahyudi & Kristianto, 2020)

Dinamika kebijakan publik dan regulasi di Indonesia menuntut kelincahan organisasi dan fleksibilitas strategis, sebagaimana ditekankan dalam teori kapabilitas dinamis. Kemampuan perusahaan untuk mendeteksi, memanfaatkan, dan mengubah diri dalam merespons perubahan regulasi menjadi sumber

keunggulan bersaing. Kecerdasan regulasi dan kemampuan menjalin hubungan dengan pemerintah menjadi kapabilitas organisasi yang semakin penting dalam lingkungan politik yang dinamis. Hubungan antara pemerintah dan bisnis merupakan tema sentral dalam ekonomi politik komparatif. Di Indonesia, tata kelola berbasis hubungan masih memiliki peran signifikan meskipun terjadi pergeseran menuju tata kelola berbasis aturan. Perusahaan yang mampu membangun keterlibatan produktif dengan pemerintah melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel akan memperoleh akses informasi, pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, dan kesempatan untuk memanfaatkan insentif. Namun, hal ini harus dilakukan dalam koridor etika bisnis untuk menghindari penguasaan regulasi dan kapitalisme kroni. (Wijaya & Santoso, 2021)

Strategi mitigasi risiko politik melalui diversifikasi geografis, fleksibilitas strategis, dan *political risk insurance* mencerminkan aplikasi risk management theory dalam domain politik. *Political scenario planning* menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan politik dan dampaknya terhadap bisnis. Hal ini sejalan dengan *strategic foresight approach* yang menekankan pentingnya preparedness dalam menghadapi *uncertainty*.

4. Integrasi Teoretis Ketiga Aspek dalam Penilaian Kelayakan Bisnis

Kajian teoretis ini menegaskan bahwa penilaian kelayakan bisnis yang komprehensif memerlukan kerangka terpadu yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam membentuk ekosistem bisnis. Aspek ekonomi menyediakan kelayakan finansial, aspek sosial memberikan legitimasi dan keberlanjutan, sementara aspek politik menyediakan regulasi dan stabilitas kelembagaan. Integrasi ini mencerminkan pergeseran dari kapitalisme berbasis pemegang saham menuju kapitalisme berbasis pemangku kepentingan, di mana keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan investasi, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia dengan kompleksitas geografis, demografis, sosial-budaya, dan politik yang tinggi, pendekatan terpadu bukan hanya diinginkan tetapi juga diperlukan untuk memastikan kelangsungan usaha jangka panjang dan daya saing yang berkelanjutan. (Lestari & Budiman, 2021)

Kerangka teoretis yang muncul dari kajian ini menekankan pentingnya penilaian menyeluruh (penilaian holistik) yang menggabungkan ukuran keuangan, indikator dampak sosial, dan faktor risiko politik dalam satu kerangka kelayakan bisnis. Hal ini sejalan dengan perkembangan teori manajemen modern yang menekankan pemikiran sistem dan pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. Implikasi teoretis dari kajian ini adalah perlunya pengembangan teori bisnis lokal yang peka terhadap konteks Indonesia, namun tetap berlandaskan teori-teori yang sudah mapan dari literatur internasional. Konsep-konsep seperti Tri Hita Karana, Daliha Na Tolu, dan modal sosial lokal dapat memperkaya teori manajemen global dengan perspektif yang spesifik budaya, relevan untuk pasar berkembang dengan budaya konteks tinggi. (Firmansyah & Hidayat, 2020)

Akhirnya, kajian teoretis ini membuka peluang untuk penelitian empiris lebih lanjut yang dapat menguji validitas framework integratif ini dalam berbagai konteks industri dan regional di Indonesia. Penelitian kuantitatif yang mengukur relative importance dari ketiga aspek, serta studi kasus yang mengeksplorasi best practices dalam mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, akan memberikan

kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik penilaian kelayakan bisnis di Indonesia. (Susanto & Marlina, 2021)

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penilaian kelayakan bisnis di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik secara terpadu. Aspek sosial berperan dalam membangun legitimasi, keberlanjutan, dan social capital melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta integrasi nilai budaya lokal. Aspek ekonomi menjadi fondasi kelayakan finansial melalui analisis profitabilitas, efisiensi operasional, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi makro, sementara analisis risiko dan strategi mitigasinya memastikan daya tahan bisnis terhadap volatilitas pasar. Aspek politik memberikan stabilitas regulasi, kepastian hukum, dan hubungan pemerintah-bisnis yang kondusif, sehingga meminimalkan risiko politik. Integrasi ketiga aspek ini menciptakan kerangka penilaian kelayakan bisnis yang holistik, mendukung keberlanjutan jangka panjang, dan mendorong penciptaan nilai tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan ini, sarannya adalah semua pelaku bisnis dan peneliti yang melakukan studi kelayakan bisnis di Indonesia harus mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. Proses pemeriksaan kelayakan suatu bisnis harus dimulai dari aspek sosial, sehingga bisnis dapat membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat, memberikan manfaat sosial yang nyata, dan memasukkan nilai-nilai lokal ke dalam cara mereka menjalankan operasinya. Di saat yang sama, aspek ekonomi membutuhkan perencanaan keuangan yang lebih baik, prediksi keuntungan yang jujur, dan kesadaran akan potensi masalah pasar di masa mendatang.

Selain itu, pelaku bisnis harus memperhatikan kebijakan pemerintah yang baru, memahami cara kerja politik, dan bekerja sama dengan baik dengan orang dan kelompok penting.

Hal ini membantu mengurangi masalah yang disebabkan oleh perubahan aturan. Keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan politik harus dibangun sejak awal perencanaan dan dijaga melalui pemeriksaan berkala. Dengan demikian, keputusan bisnis tidak hanya baik secara finansial tetapi juga berkelanjutan, adil, dan mampu menghadapi perubahan di dunia luar. Metode ini dimaksudkan untuk menciptakan model bisnis yang lebih kuat dan menawarkan nilai lebih bagi perusahaan, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S., & Kasmiruddin, K. (2020). Analisis Kelayakan Bisnis dari Aspek Finansial dan Non-Finansial pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 45-58. <https://jurnal.uui.ac.id/JEB>
- Wijaya, A., & Santoso, B. (2021). Pengaruh Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik terhadap Keberhasilan Usaha di Era Digital. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 21(2), 134-148. <https://journal.feb.unmul.ac.id/>

- Kusuma, H., & Pradana, M. (2020). Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Legitimasi Sosial Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(3), 201-215. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab>
- Rahmawati, D., & Setiawan, A. (2022). Analisis Kelayakan Investasi dengan Pendekatan Multidimensional: Studi Kasus UMKM Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 89-102. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jrmb>
- Nugroho, P., & Suharto, R. (2021). Peran Stabilitas Politik dalam Mendukung Iklim Investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 167-180. <https://jurnal.uns.ac.id/jep>
- Firmansyah, A., & Hidayat, T. (2020). Studi Kelayakan Bisnis: Integrasi Aspek Finansial dan Non-Finansial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(4), 312-327. <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/>
- Suryani, E., & Pratiwi, D. (2022). Pengaruh Kondisi Ekonomi Makro terhadap Keputusan Investasi Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(1), 78-93. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp>
- Handoko, B., & Wibowo, A. (2021). Analisis Risiko Politik dalam Penilaian Kelayakan Proyek Investasi. *Jurnal Manajemen Strategi*, 8(2), 145-159. <https://journal.feb.unila.ac.id/>
- Sari, N., & Rahman, F. (2020). Social Capital dan Keberlanjutan Bisnis di Indonesia: Perspektif Stakeholder. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 16(3), 223-238. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi>
- Hidayat, M., & Kurniawan, D. (2022). Evaluasi Kelayakan Bisnis Menggunakan Metode Net Present Value dan Internal Rate of Return. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(1), 56-71. <https://e-journal.unair.ac.id/JIM>
- Lestari, P., & Budiman, A. (2021). Dampak Regulasi Pemerintah terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(2), 189-204. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkep>
- Hakim, L., & Nurhasanah, S. (2020). Penerapan Triple Bottom Line dalam Penilaian Kinerja Perusahaan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 401-416. <https://jamal.ub.ac.id/>
- Utami, R., & Saputra, H. (2022). Analisis PESTEL dalam Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Holistik. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 112-127. <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/>
- Susanto, E., & Marlina, L. (2021). Peran Aspek Sosial Budaya dalam Keberhasilan Penetrasi Pasar Lokal. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 267-282. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jim>
- Wahyudi, T., & Kristianto, P. (2020). Strategi Mitigasi Risiko dalam Penilaian Kelayakan Investasi di Pasar Emerging. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(4), 534-549. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp>